

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Kepolisian dalam Penertiban Knalpot *Racing* pada Sepeda Motor di Satlantas Polres Kota Gorontalo”, maka kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam penertiban knalpot *racing* pada sepeda motor di Kota Gorontalo, sudah melakukan perannya sebagai Kepolisian sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal, penanggulangan pelanggaran penggunaan Knalpot *racing* pada sepeda motor dari pihak kepolisian melakukan tiga cara untuk menanggulangi hal tersebut adalah, pre-emptif, Preventif, dan represif.
2. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penertibkan knalpot *racing* adalah sebagai berikut a) Kendala substansial yang bagi menjadi dua yaitu 1. Dari pihak Kepolisian dan 2. Dari pihak masyarakat; dan b) Kendala manajerial. Kepolisian untuk mengatur lalu lintas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak kepolisian sebagai lembaga yang berwenang menegakan hukum untuk lebih meningkat lagi kinerjanya dalam melakukan Potrolidisetiap sudut Kota Gorontalo untuk minimalisir, mencegah, dan menggurangi penggunaan knalpot *racing*. Supaya Kota Gorontalo terbebas dari suara kebisingan yang dapat ditimbul oleh suara knalpot *racing*.
2. Kepada penggunaan knalpot *racing* dan tokoh-tokoh yang menjual knalpot *racing*, agar kira memiliki rasa kesadaran hukum. Bahwa knalpot *racing* dapat mengganggu pengendalian lainnya serta masyarakat.
3. Kepada masyarakat dan pihak kepolisian agar bisa berkerja sama dalam mengurangi penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor. Adanya kerja sama tersebut sangat berdampak baik dalam lingkungan masyarakat, dan kepolisian bisa melakukan sosialisai secara langsung ke masyarakat sehingga tercipta kesadaran hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirdjosworo, Seodjono. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, Ainur Rahman. 2018. *Sinergitas Filsafat Ilmu dengan Khazanah Kearifan Lokal Madura*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Kusanto. 2019. *Menelusuri Sejarah Alat Transportasi*. Semarang: Alprin.
- Nugrahani, Farida. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prawa, Anak Agung G.O. Wita, I Nyoman. Dewi, Anak Agung I.A.A.D. dkk. 2016. *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sidiq, Umar dan Choiri, Moh Miftachul. 2019 *Metode Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: C.V Nata Karya.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali pers.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suryaningsi. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Thahir, Andi. 2016. *Psikologi Kriminal*. Bandar Lampung.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. 2019. *Pengantar Hidup Kepolisian*. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Widodo, Wahyu: 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Skripsi

- Ahmad, Yasri. 2016. *Peranan Patroli Polisi dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*. Makassar. Program Studi Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Aprillia, Arzen. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor*. Padang. Program Kekhususan: Hukum Universitas Andalas Padang.
- Lakoro, Riski. 2020. *Efektivitas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penggunaan Kendaraan Roda Dua di Kota Gorontalo*. Program Studi Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahendrartha, Azizul. 2020. *Penerepan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Mendukung Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Di SMP N 1 Prabumulih*. Palembang. Program Pascasarjana. Universitas PGRI Palembang.
- Pradipta, Evan Mahadika. 2018. *Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Zulkardi. 2019. *Penertiban Pedagang Kaki Lima*. Banda Aceh. Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri AR-Raniry.
- Rahawarin, Fauzia. 2017. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Jurnal

- Arischa, Suci. 2019 Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*. 6: 1-15.
- Danendra, Ida Bagus Kade. 2012. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *LexCrimen*. 1(4): 41-58.
- Endri, Elsera dan Marisa. 2016. Makna Keteraturan Berlalu Lintas. *Jurnal Selat*. 4(1): 34-52.
- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. 1(3): 13-26.

Musy. Moh Rafie. 2015. Tugas dan Wewenang Polri dalam Memberantas Kejahatan Narkotika. *Jurnal @Trisula LP2M Undar*. 1(1): 154-161.

Purnomo, Puji. Dan Palupi, Maria Sekar. 2016. Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan dengan Waktu, Jarak dan Kecepatan untuk Siswa Kelas V. *Jurnal Penelitian (Edisi Khusus PGSD)*. 20(2): 151-157.

Syaief, Adhiela Noer. Norsujianto, Tinton. dkk. 2014. Pengaruh *Ekhaust Manifold* terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Suzuki SMASH Tahun 2007. *Elemen*. 1(1): 19-21.

<https://polresgorontalo.com/sejarah/> (diakses 22 Maret 2021 jam 21:07 WITA).

<https://gorontalo.bps.go.id> (diakses 28 Maret 2021 jam 19:54 WITA).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Motor Tipe Baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.